

Wawancara dengan Bagian Penyusunan Program dan Anggaran II

Biro Perencanaan Setjen Depnakertrans (Ir. Haryanti, MMA).

1. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap implementasi sistem penganggaran berbasis kinerja yang terdiri dari tiga pendekatan yaitu Unified Budget, PBB, dan MTEF di Depnakertrans?

Jawab :

Penganggaran berbasis kinerja merupakan substance yang penting dan mungkin yang paling sulit dilaksanakan. Kesulitan itu terkait dengan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi PBK, seperti transparansi dan akuntabilitas, disiplin anggaran, keadilan, efisiensi dan efektivitas serta penyusunan dengan pendekatan kinerja. Pemenuhan prinsip-prinsip tersebut memerlukan perubahan mindset pimpinan, kemampuan SDM pelaksana, keakuratan perencanaan dan ditunjang dengan teknologi yang memadai. Adapun implementasi unified budget tidak mengalami kesulitan sementara implementasi MTEF dapat dilakukan dengan baik jika didukung dengan perencanaan yang baik.

2. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap implementasi penganggaran berbasis kinerja yang terdiri dari tiga pilar yaitu adanya standar kinerja, evaluasi kinerja dan standar biaya di Depnakertrans ?

Jawab:

Implementasi PBK yang terdiri dari 3 pilar belum dilakukan sepenuhnya karena Depnakertrans belum menyusun standar kinerja, evaluasi kinerja sudah dilakukan dengan menggunakan versi LAKIP dan standar biaya untuk beberapa kegiatan saja.

3. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai adanya anggapan bahwa antara prioritas yang ditetapkan dalam Renstra dan RKP dan belanja Negara terdapat inkonsistensi?

Jawab:

Inkonsistensi memang terjadi, mungkin karena operasionalisasi kegiatan dari Renstra dan RKP tidak jelas siapa yang harus menjaga kekonsistennannya.

4. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap forum trilateral meeting dikaitkan dengan konsistensi antara RKP dan RKAKL serta bagaimana implementasinya?

Jawab:

Forum trilateral cukup membantu untuk menjaga kekonsistenan. Kegiatan Prioritas dalam RKP sepanjang tercantum dalam dokumen resmi seperti SEB antara Menteri keuangan dan Bappenas akan dipatuhi oleh Kementerian/Lembaga

5. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai forum Musrenbang dikaitkan dengan sinkronisasi pelaksanaan program-program K/L dan Pemda ?

Jawab:

Forum Musrenbang mungkin cukup berguna bagi kementerian yang memiliki tugas rutin, namun bagi Kementerian yang memiliki keterkaitan dengan unit lain justru agak mengganggu, karena waktunya dilaksanakan terlalu awal, sehingga pihak kementerian belum secara matang merencanakan kegiatannya dan belum mengkonsolidasikan dengan pihak terkait.

6. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap pandangan bahwa sebagai suatu pendekatan baru sistem dan implementasi anggaran berbasis kinerja dalam operasionalnya belum dilengkapi ketentuan hukum yang memadai?

Jawab :

Saya sependapat. Perlu adanya aturan atau juknis yang lebih detil dalam implementasi PBK agar Kementerian/Lembaga tidak menafsirkan sendiri-sendiri apa yang harus dilakukan dalam memenuhi prinsip-prinsip yang diperlukan dalam implementasi PBK.

7. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap anggapan bahwa pola pengalokasian anggaran oleh K/L kepada instansi dibawahnya belum menganut konsep *money follow function and function follow structure* ?

Jawab :

Saya kira masih diperlukan effort yang terus menerus baik dari DepKeu maupun Kementerian/Lembaga sendiri untuk mensosialisasikan pendekatan baru dalam penggaran, baik konsep PBK, money follow function maupun function follow structure. Sosialisasi terutama pada tataran pembuat kebijakan, agar mereka mengerti bahwa eranya telah berubah. Akan tidak bermakna jika pemahaman perubahan hanya sampai midle magement.

8. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai hubungan kelembagaan yang berlangsung selama ini, terkait dengan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab (DPR, Bappenas, Depkeu, K/L) dalam pengelolaan anggaran Negara ?

Jawab:

Hubungan antara antar kelembagaan saya kira sudah mengalami kemajuan, mungkin yang perlu diperbaiki hubungan internal kelembagaan dalam Dep. Keu sendiri yang perlu ditingkatkan antara unit-unit yang terkait, mengingat dalam sistem penganggaran sekarang ini banyak unit kerja di Dep Keu yang terlibat dan harus memiliki kesamaan persepsi, dari yang bersifat sistem, konsep dan aturan.

9. Apakah kunci sukses implemmentasi anggaran berbasis kinerja dilihat dari aspek SDM, hubungan kelembagaan, peraturan perundangan-undangan?

Jawab :

Kunci sukses implementasi PBK dari SDM antara lain : Goodwil pimpinan, Sosialisasi dan bintek bagi pembuat kebijakan dan pelaksana teknis. Dari hubungan kelembagaan adalah koordinasi yang baik, dari aspek peraturan, diperlukan petunjuk operasional PBK.

10. Apa saran Bapak/Ibu agar Renstra/RKP, perencanaan anggaran sampai dengan Lakip memiliki tingkat konsistensi dan sinkronisasi yang tinggi?

Jawab :

Agar ada konsistensi antara renstra, RKP dan Lakip diperlukan : Pertama, Kemauan dan kemampuan pimpinan untuk melaksanakan PBK, Kedua, Peningkatan SDM pelaksana tingkat menengah dan operator, agar kebijakan-kebijakan pimpinan dapat dioperasionalkan dengan tepat, Ketiga, Peraturan turunan dari UU maupun PP yang terkait baik PMK, SE maupun informasi lain yang mudah diakses dan peraturan yang ada, satu sama lain saling melengkapi bukan malah membingungkan pengguna.

11. Apa saran Bapak/Ibu dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan renja K/L dan RKAKL serta penyempurnaan penerapan penganggaran berbasis kinerja?

Jawab :

Hampir sama dengan nomor 10. Perlu ditambahkan, informasi yang masih minim dan kurang tersosialisasi sehingga menimbulkan beragam interpretasi adalah masalah Bagan Akun Standar.

12. Apa saran Bapak/Ibu untuk Departemen Keuangan khususnya Ditjen Anggaran sebagai pelaku utama reformasi bidang keuangan Negara khususnya dalam penerapan PBB ?

Jawab :

Agar lebih proaktif, karena Dit Jen Anggaran merupakan fasilitator K/L untuk menjembatani unit-unit yang terkait dengan implementasi PBK. Lalu membantu agar renumareasi juga ditularkan pada kementerian lain .

Lampiran 2

Wawancara Dengan Pgs. Sekretaris Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Bapak Ending Haerudin)

1. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap implementasi sistem penganggaran berbasis kinerja yang terdiri dari tiga pendekatan yaitu Unified Budget, PBB, dan MTEF di Depnakertrans?

Jawab :

Saya kira dengan system baru ini penggunaan anggaran sangat terkontrol, tidak terjadi lagi duplikasi pembiayaan dan sasaran pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tupoksi kami lebih terarah. MTEF sudah mulai diterapkan walaupun saya sadari belum sempurna benar, karena focus kami kepada perencanaan kegiatan tahun yang bersangkutan.

2. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap implementasi penganggaran berbasis kinerja yang terdiri dari tiga pilar yaitu adanya standar kinerja, evaluasi kinerja dan standar biaya di Depnakertrans ?

Jawab :

Dalam hal-hal tertentu terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak ditampung diawal perencanaan, misalnya untuk penanganan unjukrasa dan perselisihan. Nah itu gimana solusinya, karena hal tersebut sifatnya insidental dan sulit diprediksi, padahal alokasi anggaran tidak mengenal adanya semacam dana kontingensi.

Mengenai evaluasi kinerja saya kira belum dapat dikerjakan secara keseluruhan dan Standar biaya umum untuk untuk Ditjen PHI masih sulit untuk diterapkan, karena adanya kegiatan-kegiatan yang non standar.

Untuk kegiatan Ditjen PHI saya sudah coba mengajukan usulan standar biaya misalnya untuk kegiatan2 bintek arbiter dan konsiliator masuk sbk, tetapi di tolak karena Bimbingan Teknis dianggap bersifat umum.

3. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai adanya anggapan bahwa antara prioritas yang ditetapkan dalam Renstra dan RKP dan belanja Negara terdapat inkonsistensi?

Jawab :

Diakui tahun sebelumnya memang demikian, tapi seiring berjalannya waktu akan lebih baik dan tugas Ditjen PHI adalah agar dipatuhinya ketentuan yang mengatur hubungan industrial, sehingga adanya harmoni antara pekerja dan pengusaha untuk menciptakan iklim kondusif bagi perekonomian dan dunia usaha .

4. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap pandangan bahwa sebagai suatu pendekatan baru sistem dan implementasi anggaran berbasis kinerja dalam operasionalnya belum dilengkapi ketentuan hukum yang memadai?

Jawab :

Pedoman sudah memadai, hanya didalam implementasinya seringkali menyulitkan dipelaksanaan pencairan. Perlu adanya limit waktu yang panjang untuk menyosialisasikan peraturan.

5. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap anggapan bahwa pola pengalokasian anggaran oleh K/L kepada instansi dibawahnya belum menganut konsep *money follow function and function follow structure* ?

Jawab :

Masing- unit eselon I memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga dalam mengalokasikan, untuk PHI maka pengalokasian ke satker-satker di daerah harusnya memperhatikan jumlah perusahaan, jumlah pelaksana teknis konsiliator mediator dan arbiter. Untuk saat ini, terus terang kami belum menerapkan criteria tertentu, karena belum ada pemetaan terhadap criteria di atas.

Selanjutnya terbitnya PP nomor 7 yang mengatur dana dekon untuk kegiatan non fisik dan dana tugas untuk kegiatan fisik, cukup menyulitkan dalam pelaksanaan tugas kami, karena tupoksi lebih banyak bersifat non fisik, karena ujung tombak pelaksanaan tugas ke phi an justru adanya di tingkat II. Jadi PP

nomor 7 menurut kami kurang pas untuk tugas bidang ke-PHI-an, karena Pembinaan Hubungan Industrial bukan kegiatan fisik.

6. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai hubungan kelembagaan yang berlangsung selama ini, terkait dengan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab (DPR, Bappenas, Depkeu, K/L) dalam pengelolaan anggaran Negara ?

Jawab :

DPR seharusnya melakukan pembahasan masalah dalam tataran strategis yang bersifat makro tidak detail. Adapun kinerja Ditjen Anggaran dan Bappenas saat ini menunjukkan peningkatan antara lain dengan semakin cepatnya waktu penyelesaian pembahasan, DIPA dapat terbit tepat waktu.

7. Apa bapak setuju penerapan PBB perlu perubahan mindset?

Jawab :

Saya kira setuju, perlu ada perubahan mindset, tetapi disisi lain perlu pula ada peningkatan remunerasi pegawai.

8. Apa saran Bapak/Ibu dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan renja K/L dan RKAKL serta penyempurnaan penerapan penganggaran berbasis kinerja?

Jawab :

Saya kira yang terpenting adalah adanya upaya untuk meningkatkan SDM perencanaan, terutama di Ditjen PHI perlu peningkatan baik dari sisi kapasitas, maupun kompetensinya.

9. Apakah peran Biro Perencanaan sudah maksimal dalam menilai usulan alokasi anggaran dan kegiatan?

Jawab :

Saya kira belum, karena belum ada analisa terhadap usulan padahal alokasi harusnya didasarkan prioritas2 tahun berkenan, kompetensi Biro perencanaan harus lebih tinggi dari unit.

10. Saran penerapan PBB?

Jawab :

Usulan dari bawah harus diuji dan ada rentang waktu untuk menguji, selama ini waktu terlalu mepet sehingga usulan mengesampingkan kualitas karena mengejar target waktu. Misalnya usulan untuk alokasi dana bidang Pembinaan Hubungan Industrial untuk kasus di Jakarta dan Yogyakarta harus diperlakukan berbeda dan ada pemetaan terhadap jumlah perusahaan, jumlah kasus, jumlah tenaga fungsional yang menangani bidang yang berkaitan dengan harmonisasi hubungan industrial. Penerapan PBB sudah bagus tapi perlu perbaikan dalam berbagai hal.



Wawancara dengan Kepala Bagian Perencanaan Evaluasi dan Penganggaran Ditjen Binapenta Bapak Budi Hartawan.

1. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap Implementasi system penganggaran berbasis kinerja yang terdiri dari tiga pendekatan yaitu Unified Budget, Performance Based Budgeting (PBB), dan Medium Term Expenditure Framework (MTEF) di Depnakertrans?

Jawab :

Implementasi system penganggaran berbasis kinerja di depnakertrans sebelumnya memakai system yang terpisah-pisah (*dual budget*), pada saat ini Sistem penganggaran di Depnakertrans mengikuti system penganggaran terpadu (Unified Budget) dimana antara penganggaran rutin dan proyek disatukan dalam satu Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang mempermudah proses pelaksanaan anggaran sehingga diharapkan tidak terjadinya duplikasi anggaran. Demikian pula dengan system penganggaran berbasis kinerja (Performance based budgeting) dan Medium Term Expenditure Framework (MTEF) dimana penganggaran yang direncanakan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang memiliki prioritas-prioritas yang nantinya akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah. Sasaran dalam Rencana kerja Pemerintah pada tahun 2009 dibidang ketenagakerjaan misalnya menurunkan angka pengangguran terbuka menjadi 7,8 persen dan menciptakan kesempatan/lapangan kerja baru sebanyak 2,0-3,1 juta orang, sedangkan Arah kebijakan untuk peningkatan iklim ketenagakerjaan adalah Kebijakan pasar kerja yang luwes, konsolidasi program-program perluasan kesempatan kerja yang dilakukan pemerintah, penyediaan lapangan kerja melalui padat karya produktif, peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

2. Bagaimana Penilaian Bapak terhadap Implementasi penganggaran berbasis kinerja yang terdiri dari tiga pilar yaitu adanya standar kinerja, evaluasi kinerja dan standar biaya di unit Bapak khususnya dan Depnakertrans umumnya?

Jawab :

Harus diakui bahwa belum semua unit atau bagian menetapkan standar kinerja, hal ini disebabkan belum adanya kesamaan pemahaman sehingga perlu lebih banyak melakukan sosialisasi terhadap bagaimana menetapkan standar kinerja, apa yang diukur, bagaimana cara mengukur dan dengan metoda apa, misalnya pakai balance scorecard-kah, parameternya apa saja? Tupoksi antar direktorat dan subdit di unit kami memiliki karaktersitik

berbeda-beda, ada yang bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat misalnya penerbitan ijin mempergunakan tenaga kerja asing (IMTA), ada juga yang tupoksinya menyusun regulasi atau pedoman teknis, dan ini perlu disepakati standar kinerjanya, apakah melihat dari sisi kualitas pelayanan, kuantitas produk atau dari sisi biaya. Untuk penyusunan standar biaya terdapat beberapa permasalahan antara lain: pertama, saat ini nomenklatur kegiatan dan subkegiatan belum terstruktur dengan baik yang belum mencerminkan tupoksi masing-masing unit eselon II/subdit atau bagian sehingga belum ada kesepahaman di level mana sebaiknya standar biaya ditempatkan. Kedua, time constraint, jadwal waktu penyusunan SBK biaya sangat sempit dan harus dilengkapi data dukung, sehingga teman-teman kesulitan untuk memenuhi permintaan Depkeu untuk menyampaikan usulan SBK. Ketiga, SBK bersifat mengikat sehingga mengurangi fleksibilitas dalam hal terdapat perubahan harga sesuai kondisi lapangan. Keempat, Tidak adanya reward and punishment bagi unit yang menyusun atau tidak menyusun SBK, sehingga tidak ada motivasi untuk menyusunnya, walau kita tahu itu bermanfaat dalam penyusunan perencanaan anggaran.

3. Bagaimana pandangan Bapak/ Ibu mengenai adanya anggapan bahwa antara prioritas yang ditetapkan dalam Renstra dan RKP dan belanja Negara terdapat inkonsistensi?

Jawab :

Prioritas yang ditetapkan dalam Renstra dan RKP dan belanja Negara memang terkadang terdapat inkonsistensi karena perbedaan persepsi antara K/L dan Bappenas, sehingga terkadang target RKP yang ditetapkan oleh Bappenas dibandingkan dengan pagu anggaran yang ditetapkan tidak sinkron sehingga K/L terpaksa menyesuaikan RKP yang ditetapkan dengan Pagu yang ditetapkan oleh Depkeu.

4. Bagaimana pendapat Bapak/ Ibu terhadap manfaat forum trilateral meeting (K/L, Bappenas, Depkeu) dikaitkan dengan konsistensi antara RKP dan RKAKL serta implementasinya?

Jawab :

Forum Trilateral Meeting sangat diperlukan untuk mempersamakan persepsi antara ketiga lembaga dalam penetapan Rencana Kinerja Pemerintah dan RKA-KL, sehingga apa yang diamanatkan dalam RKP dapat implementasikan dalam RKA-KL, akan tetapi sebaiknya Bappenas dan Depkeu dapat memberikan penjelasan kepada DPR tentang perencanaan anggaran yang dilakukan sehingga tidak terjadi kekurangan dalam perencanaan anggaran yang dituangkan dalam RKA-KL.

5. Bagaimana pendapat Bapak/ Ibu mengenai forum Musrenbang dikaitkan dengan sinkronisasi pelaksanaan program-program K/L dan Pemda?

Jawab :

Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan sangat baik sekali untuk memberikan gambaran output yang ingin dicapai dalam Pembangunan nasional disamping untuk mengetahui potensi daerah dan permasalahan-permasalahan yang hendak diselesaikan, sehingga antara para pemangku kepentingan dapat menyepakati rencana kegiatan pada tahun anggaran yang berjalan, Musrenbang juga berfungsi untuk menghasilkan kesepakatan-kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan kerja pemerintah, dan rancangan kerja pemerintah daerah, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi rencana kerja antar kementerian/ lembaga dan daerah.

6. Bagaimana pendapat Bapak/ Ibu terhadap pandangan bahwa sebagai suatu pendekatan baru system dan implementasi anggaran berbasis kinerja dalam operasionalnya belum dilengkapi ketentuan hukum yang memadai?

Jawab :

Ketentuan hukum yang mengatur mengenai pendekatan system dan implementasi anggaran berbasis kinerja sudah cukup mendukung dalam pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja.

7. Bagaimana pendapat Bapak bahwa pola pengalokasian anggaran oleh K/L kepada instansi di bawahnya belum menganut konsep money follow function and function follow structure, tetapi masih terkesan mekanisme pengalokasian anggaran di K/L masih tampak lebih dominan input based daripada output/ outcome based?

Jawab :

Memang idealnya masing-masing unit I, eselon II dan satker menerapkan konsep ini (money follow function) dalam arti pengalokasian dana harus mengacu kepada tupoksi dan prioritas program dan kegiatan yang menjadi concern pemerintah dan menakertrans, sehingga tidak ada lagi pengalokasian anggaran seperti bagi-bagi resources, Dalam hal ini terdapat alasan yang rasional mengapa suatu unit atau bagian alokasi dana lebih besar atau lebih kecil, berdasarkan rumusan tertentu dan tentu saja didasarkan atas hasil evaluasi kinerja program/kegiatan tahun sebelumnya, dan yang lebih penting lagi adalah adanya komitmen bersama dari pejabat yang terlibat.

8. Bagaimana penilaian Bapak/ Ibu mengenai hubungan kelembagaan yang berlangsung selama ini, terkait dengan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab (DPR, bappenas, Depkeu, K/L) dalam pengelolaan anggaran negara?

Jawab :

Sinkronisasi dan koordinasi antar Lembaga saya kira masih perlu ditingkatkan, dan saat ini saya kira kita menuju kesana. Dalam hal ini perlu ada ketegasan pembagian kewenangan, misalnya sampai sejauhmana DPR terlibat dalam perencanaan anggaran, mana yang menjadi kewenangan Bappenas, dan mana yang menjadi kewenangan Depkeu, sehingga tidak menimbulkan confuse bagi kami di K/L mana yang harus kami pedomani.

9. Bagaimana pandangan Bapak/ Ibu terhadap pandangan bahwa perubahan system penganggaran perlu diimbangi dengan perubahan mindset dari aktor-aktor yang terlibat dalam penyusunan anggaran?

Jawab :

Kita memang sangat terbiasa dengan pola lama, dan merubah mindset bukan perkara yang mudah dan itu butuh waktu, kesabaran, kedewasaan, pemahaman dan komitmen dari teman-teman di Depnakertrans, agar terbiasa bekerja profesional dan mengesampingkan hal-hal yang bersifat vested interest.

10. Apa saran Bapak untuk Bappenas, Depkeu dan saran untuk K/L sendiri dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan renja K/L dan RKAKL serta penyempurnaan penerapan penganggaran berbasis kinerja?

Jawab :

Saran saya dalam rangka penyempurnaan penerapan anggaran berbasis kinerja adalah adanya komunikasi yang intens antara bappenas, Depkeu dan K/L agar tidak terjadi kesenjangan informasi, sehingga apa yang diharapkan dari perencanaan dan penganggaran dapat diimplementasikan di tataran teknis pelaksanaan, karena adanya sinkronisasi antara renstra, rkp dan renja K/L.

Wawancara dengan Bapak Mulyanto Sekretaris Ditjen Binalattas Depnakertrans.

1. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap implementasi sistem penganggaran berbasis kinerja yang terdiri dari tiga pendekatan yaitu Unified Budget, PBB, dan MTEF di Depnakertrans?

Jawab :

Kalau kita lihat dari sisi perbaikan kualitas perencanaan dan penganggaran tentu saja terdapat perbaikan jika dibanding dengan penerapan system sebelumnya, duplikasi pendanaan dapat dikontrol karena kita telah menerapkan unified budget, sehingga tidak lagi mengenal pemisahan alokasi dana untuk pengeluaran rutin dan pembangunan, akan tetapi focus terhadap sasaran dan tujuan program dan kegiatan dengan penekanan terhadap output dan outcome masing-masing unit mengacu kepada tupoksi, sehingga system sekarang lebih mendorong transparansi dan peningkatan akuntabilitas penggunaan anggaran. Mengenai penerapan performance based budgeting saat ini kita masih dalam tahap pembelajaran dalam arti pemahaman terhadap konsep PBB ini belum secara merata dipahami baik di level staf, middle manajemen, maupun top manajemen. Kita tahu bahwa negara-negara yang sudah majupun butuh waktu yang relatif lama untuk sampai pada tahap yang cukup ideal dalam penerapan PBB ini. Adapun mengenai penerapan Medium Term Expenditures Framework (MTEF) saya kira konsepnya bagus ya, kita dituntut untuk menyusun perencanaan anggaran dan kegiatan dengan horizon waktu lebih dari satu tahun, sehingga kontinuitas dan konsistensi perencanaan dapat terjaga, tidak terputus-putus sebagaimana system sebelumnya. Tentu saja bagi kami tidak ada permasalahan karena kita kan sudah punya rencana strategis program dan kegiatan untuk kurun waktu, namun yang menjadi permasalahan adalah kita sudah menyusun renstra untuk lima tahun termasuk kebutuhannya, namun dalam pelaksanaan alokasi dana yang kami terima tidak mencukupi untuk mencapai target-target dan sasaran yang ditetapkan dalam renstra

dimaksud, akhirnya kami terpaksa melakukan penyesuaian-penyesuaian target dan sasaran pada renstra kami. Sehingga kami mengusulkan untuk lebih menjamin kepastian dalam penyusunan target dan sasaran kinerja, agar resources envelope dapat diberikan untuk kurun waktu lima tahun, sehingga kami dapat lebih pasti dalam menetapkan target-target sehingga kedepan tidak perlu lagi ada revisi renstra.

2. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap implementasi penganggaran berbasis kinerja yang terdiri dari tiga pilar yaitu adanya indikator kinerja, evaluasi kinerja dan standar biaya di Depnakertrans ?

Jawab:

Dengan penerapan system baru K/L didorong untuk terus menerus melakukan perbaikan kinerja, pola-pola lama dimana birokrat adalah penguasa bukan pelayan masyarakat tidak relevan lagi untuk saat ini. Instansi pemerintah dituntut untuk lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, dan efisiensi dalam pembiayaannya, untuk itu perlu ada indicator kinerja, ada evaluasi kinerja dan standar biaya.

Dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tupoksi kami, upaya peningkatan kualitas program dan kegiatan terus menerus ditingkatkan, bahkan gagasan Menakertrans untuk melakukan revitalisasi dibidang ketenagakerjaan kami respon antara lain adanya kegiatan revitalisasi BLK menjadi tempat pelatihan berbasis kompetensi, BLK-BLK diarahkan untuk lebih professional dan dapat mengembangkan kompetensi sesuai pasar kerja yang dibutuhkan. sarana dan prasarana pelatihan diperbaiki, begitu juga kompetensi dan kuantitas instruktur BLK kami perhatikan, dan progress dari kegiatan-kegiatan ini kami evaluasi guna perbaikan dimasa depan. Untuk Penyusunan standar biaya baik secara kuantitas maupun kualitas belum memenuhi ukuran ideal, dari sekian kegiatan di unit kami hanya kegiatan pelatihan kerja berbasis masyarakat, yang sudah memiliki standar biaya yaitu untuk 65 jenis pelatihan, kedepan kami berharap akan lebih banyak lagi standar biaya yang kami susun misalnya untuk kegiatan pelatihan kerja berbasis kompetensi. Terus terang kami belum dapat menyusun standar biaya yang mencerminkan harga setempat, misalnya harga menurut

provinsi/kabupaten kota. Standar biaya yang dapat kami susun hanya sebatas standar harga yang diklasifikasikan menurut batasan regional, misalnya untuk regional wilayah barat meliputi Sumatera dan Jawa/Bali, untuk regional tengah meliputi Kalimantan, Sulawesi dan NTB, dan wilayah timur meliputi Maluku, Papua dan NTT. Ini pun setelah kami susun bersama dengan DJA ternyata untuk satuan harga wilayah timur sulit untuk diterapkan karena tingginya disparitas harga misalnya untuk bahan-bahan pelatihan jauh berbeda dengan standar yang telah ditetapkan, harga semen aja di Papua bisa mencapai Rp 500.000 per/sak, dibandingkan dengan harga semen di Pulau Jawa.

3. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai adanya anggapan bahwa antara prioritas yang ditetapkan dalam Renstra dan RKP dan belanja Negara terdapat inkonsistensi?

Jawab:

Inkonsistensi sangat mungkin terjadi karena adanya kesenjangan komunikasi, jadi apa yang menjadi grand design pembuat kebijakan tidak dapat diterjemahkan secara tepat dalam operasionalisasinya, idealnya memang dari RPJM, Renstra, RKP dan RKAKL terdapat benang merah yang dapat ditarik, permasalahannya adalah siapa yang akan menjaga harus menjaga kekonsistennannya. Kadang-kadang alokasi dana yang ditetapkan Bappenas sebagian besar untuk kegiatan prioritas nasional yang dilaksanakan oleh satu atau dua Direktorat saja karena memang tupoksi Direktorat yang bersangkutan, lalu bagaimana dengan Direktorat-Direktorat lain apakah mereka lalu tahun itu tidak bekerja karena tidak mendapat alokasi?

4. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap forum trilateral meeting dikaitkan dengan konsistensi antara RKP dan RKAKL serta bagaimana implementasinya?

Jawab:

Forum trilateral saya kiranya bermfaat paling tidak untuk menajamkan prioritas-prioritas program dan kegiatan K/L serta melakukan sinkronisasi apa yang menjadi prioritas nasional, prioritas bidang dan prioritas K/L,

tetapi masih perlu pengaturan jadwal waktu yang cukup karena kami juga perlu mempersiapkan bahan-bahan dan konsolidasi dengan teman-teman kami di direktorat.

5. Bagaimana pendapat Bapak terhadap pandangan bahwa sebagai suatu pendekatan baru sistem dan implementasi anggaran berbasis kinerja dalam operasionalnya belum dilengkapi ketentuan hukum yang memadai?

Jawab :

Saya sependapat untuk hal ini. Tentunya Bappenas dan Depkeu perlu merumuskan peraturan yang baku bagaimana seharusnya K/L memenuhi prinsip-prinsip penyusunan anggaran berbasis kinerja ketentuannya seperti apa, penafsirannya bagaimana, sehingga pemahamannya sama, tentu saja teman-teman di Depkeu yang bersentuhan langsung dengan penyusunan RKAKL juga perlu dibekali agar memiliki penguasaan dan kompetensi yang sama, sehingga tidak terjadi standar ganda dalam menafsirkan suatu peraturan.

6. Bagaimana pendapat Bapak terhadap anggapan bahwa pola pengalokasian anggaran oleh K/L kepada instansi dibawahnya belum menganut konsep *money follow function and function follow structure* ?

Jawab :

Konsep anggaran berbasis kinerja memang mensyaratkan adanya ketaatan terhadap tupoksi, sehingga akan lebih mudah untuk melakukan pengukuran terhadap kinerja masing-masing. Paradigma lama membuat dan mengusulkan kegiatan yang berorientasi proyek dengan maksud tertentu perlu kita tinggalkan, artinya apa yang tercantuk dalam dokumen perencanaan dan anggaran adalah benar-benar dalam rangka pelaksanaan tupoksi yang menjadi tanggungjawabnya.

7. Bagaimana penilaian Bapak mengenai hubungan kelembagaan yang berlangsung selama ini, terkait dengan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab (DPR, Bappenas, Depkeu, K/L) dalam pengelolaan anggaran Negara ?

Jawab:

Saya kira masing-masing lembaga saat ini sudah semakin menyadari posisi masing-masing, sesuai kewenangannya DPR memiliki hak budget, namun tentu saja keterlibatan DPR dalam tataran penetapan kebijakan makro, sehingga dalam melaksanakan pembahasan anggaran tidak masuk dalam tataran teknis, begitu juga Depkeu seharusnya diberikan kewenangan yang lebih luas dalam hal pelaksanaan revisi anggaran, misalnya revisi antar kegiatan baik karena optimalisasi maupun bukan karena optimalisasi tetap menjadi kewenangan Depkeu, bahkan lebih jauh revisi antar program sepanjang tidak merubah pagu, tetap menjadi kewenangan Depkeu. Begitu juga dalam hubungan kelembagaan tentu harus mengedepankan kesejajaran, dalam arti jangan ada yang merasa bahwa departemen/lembaga tertentu lebih penting dari yang lain.

8. Apakah kunci sukses implemementasi anggaran berbasis kinerja dilihat dari aspek SDM, hubungan kelembagaan, peraturan perundangan-undangan?

Jawab :

Kunci sukses dari sisi SDM adalah pertama, perlunya peningkatan kapasitas dan kompetensi terutama yang berhadapan langsung dengan tugas-tugas perencanaan, dan saya kira pegawai yang memiliki kompetensi tersebut di unit kami belum memadai, kedua perlu adanya perubahan mindset baik dari pejabat maupun staf, ketiga, diperbaikinya system remunerasi pegawai diikuti dengan penerapan reward and punishment yang seimbang, keempat perlu koordinasi yang lebih intensif dengan *stakeholders* terkait, dan kelima perlu peraturan perundangan-undangan dan petunjuk teknis dari penerapan PBB guna menjamin kepastian dan meningkatkan akuntabilitas anggaran.

Wawancara dengan Kepala Subdit Data dan Dukungan Teknis Ditjen Anggaran Departemen Keuangan Bapak Purwanto, M.Sc.

1. Bagaimana kebijakan penyusunan standar biaya kementerian/lembaga kedepan, karena nampaknya belum semua K/L menyadari pentingnya penyusunan standar biaya kegiatan?

Jawab :

Penyusunan standar biaya saat memang sifatnya sebatas himbauan, dan belum ada ketentuan yang mengharuskan K/L menyusun standar biaya. Kita hanya mencoba mengarahkan dan memberi pengertian kepada K/L bahwa penyusunan standar biaya penting dalam kerangka penyusunan anggaran berbasis kinerja, untuk memudahkan dan mempercepat kita dalam melakukan penelaahan RKAKL.

2. Bagaimana dengan penyusunan indicator kinerja dan evaluasi kinerja?

Jawab:

Sampai saat ini memang belum ada petunjuk teknis penyusunan untuk indicator kinerja dan evaluasi kinerja, namun kedepan arahnya kita akan melengkapi peraturan-peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, dan PP nomor 21 tentang RKAKL, sehingga dibidang penganggaran nantinya tidak ada lagi grey area, sehingga semua aturannya jelas, SOP jelas dan standarnya jelas. Karena selama ini kasus-kasus yang seringkali menimbulkan masalah hukum adalah masalah-masalah yang berada di grey area ini, yang belum jelas aturannya sehingga mendorong moral hazard birokrat untuk memanfaatkan celah tersebut.

3. Peran Ditjen Anggaran (DJA) sendiri ke depan seperti apa terkait dengan pelaksanaan fungsi allocative efficiency?

Jawab:

Ke depan DJA didorong untuk lebih memperkuat perannya dalam melakukan analisa terhadap usulan program dan kegiatan K/L. Bersama-sama dengan Bappenas kita akan melakukan penilaian dan analisa dalam upaya meningkatkan kualitas belanja K/L. Kita akan aktif melakukan kegiatan evaluasi, yang memang merupakan Tupoksi DJA yang selama ini belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hasil evaluasi tersebut nantinya merupakan bahan masukan bagi penyusunan anggaran tahun berikutnya. Jadi, petunjuk teknisnya nanti akan disusun, agar pelaksanaan evaluasi lebih terarah, struktur organisasinya juga saat ini sudah ada. Saya sangat berterima kasih apabila kawan-kawan di Subdit. Teknis melakukan analisa terhadap anggaran kementerian/lembaga yang menjadi tupoksinya, sehingga masukan-masukannya bisa kita bawa sebagai bahan pertemuan bulanan dalam rangka brainstorming, dengan kawan-kawan yang lain.

4. Bagaimana dengan kesiapan SDM Ditjen Anggaran Sendiri?

Jawab :

Tantangan ke depan jelas tidak semakin ringan, hal ini disadari oleh Pimpinan kita. Oleh karena itu, kita sedini mungkin mempersiapkan SDM DJA dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensinya. Kita juga mengadakan kerjasama dengan Universitas-universitas dan dengan Pusat Pengembangan Manajemen (PPM), bahkan penawaran bea siswa dalam dan luar negeri kita buka, bagi yang berminat untuk mengembangkan potensinya.

**SAMBUTAN PEMBUKAAN TERTULIS
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN**
dalam
Rapat Evaluasi Penganggaran K/L 2009/2010
Hotel Aryadhutta, 21 Desember 2009

Assalamualaikum wr. wb,

Selamat pagi;

Salam sejahtera untuk kita semua;

Yang saya hormati

Bapak-Bapak/Ibu Sekretaris Jenderal (atau yang mewakili),

Bapak-Bapak/Ibu Kepala Biro Perencanaan (atau yang mewakili),

Bapak/Ibu Narasumber,

dari Dep. Pertanian, Dep. Pekerjaan Umum, Dep. Perhubungan, Dep. Tenaga Kerja & Transmigrasi, dan Dep. Kesehatan

Serta

Bapak/Ibu hadirin dari Direktorat Jenderal Anggaran

1. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang atas perkenanNya kita dapat berkumpul pada kesempatan yang sangat jarang ini, di mana kita dapat berkumpul dengan keadaan yang sehat wal afiat.
2. Kedua, dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh kementerian/lembaga, yang merupakan stakeholders DJA, khususnya K/L mitra Direktorat Anggaran I, Direktur Anggaran I dan seluruh jajarannya yang telah bekerja dengan baik sepanjang tahun 2009 dan juga tahun-tahun sebelumnya. Dengan kerja sama yang baik itu, maka kita dapat menunaikan tugas-tugas kita, baik yang rutin maupun yang insidental; sejak penyusunan pagu indikatif, pagu sementara, dan pagu definitif 2010 dan hingga penerbitan Perpres Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan SASPK 2010; termasuk juga penyelesaian Stimulus Fiskal dan revisi SASPK 2009. Saya berharap kerja sama tersebut dapat ditingkatkan di tahun-tahun mendatang.

Bapak/Ibu sekalian,

3. Sejak digulirkannya reformasi pengelolaan keuangan negara di tahun 2005 yang diawali dengan disahkannya UU No.17 tahun 2003, kita telah sama-sama menjalani, mengalami, dan merasakan adanya perubahan dalam sistem penganggaran, atau kita sebut reformasi sistem penganggaran. Kita meninggalkan sistem dual budgeting untuk menuju ke unified budgeting. Kita mulai mengenal penganggaran berbasis kinerja dan mulai meninggalkan penganggaran berbasis input. Kita juga mempelajari penganggaran dengan kerangka jangka menengah. Hingga saat ini kita masih dalam proses untuk menerapkan ketiga hal tersebut secara lebih baik dan menuju ke tataran yang ideal.
4. Namun demikian, kita juga mengetahui bahwa sejumlah persoalan masih harus kita hadapi. Persoalan-persoalan tersebut dalam taraf tertentu menyebabkan proses perencanaan dan penganggaran tidak berjalan sebagaimana yang diamanatkan ketentuan perundangan. Beberapa permasalahan itu antara lain:
5. Pertama, belum adanya sistem monitoring dan evaluasi yang berkualitas dan kontinyu terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan kementerian/lembaga. Sebagai akibatnya, saat penyusunan perencanaan dan penganggaran, kita belum dapat menggunakan informasi yang mutakhir mengenai hasil atau output dari program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Kita juga belum dapat mengetahui secara pasti seberapa efisien dan efektifnya kegiatan yang dilakukan sebelumnya. Tanpa informasi yang utuh dan terpercaya itu, maka perencanaan dan penganggaran yang kita susun menghadapi resiko ketidakakuratan, yang kemudian menuntut adanya revisi perencanaan-penganggaran di kemudian hari. Adanya revisi-revisi tersebut merupakan masalah tersendiri yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
6. Kedua, masih adanya ketidaksamaan persepsi di antara pejabat yang mengelola program/kegiatan dan anggaran terkait dengan siklus anggaran dan mekanisme anggaran. Sebagai pengelola program/kegiatan, tentunya para pejabat di lingkup kementerian/lembaga sangat mengutamakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pencapaian target dari program/kegiatan yang dikelolanya. Tidak jarang dampak dari suatu kebijakan terhadap siklus dan mekanisme penganggaran dikemudiankan. Sebagai akibatnya, kebijakan dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan tersebut, yang niat atau tujuan sebenarnya baik, menjadi terhambat karena bertabrakan dengan peraturan di bidang penganggaran, atau diusulkan di luar siklus dan mekanisme penganggaran. Tidak jarang pula, hal tersebut menyebabkan terjadinya silang pendapat yang dilansir media massa antara pejabat di kementerian/lembaga dengan pejabat yang terkait dengan penganggaran dan keuangan negara. Tentu saja yang terakhir ini sangat tidak baik bagi citra pemerintah di mata publik.

7. Ketiga, belum meratanya pemahaman yang sama terhadap ketentuan yang berkaitan dengan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di antara para pegawai dan staf yang menyusun RKAKL, baik di kantor pusat kementerian/lembaga maupun di satuan kerja-satuan kerja yang tersebar sampai ke pelosok daerah. Sosialisasi dan bimbingan teknis memang perlu dan akan terus ditingkatkan. Namun demikian, kesulitan masih terjadi apabila staf dan petugas yang menyusun RKAKL atau terkait dengan penyusunan RKAKL seringkali berganti posisi dan pindah ke unit lain yang tidak berkaitan dengan penyusunan RKAKL. Kesulitan juga muncul karena, kita harus maklumi, para staf dan petugas penyusun RKAKL datang dari berbagai latar belakang pendidikan dan pekerjaan, sehingga satu ketentuan yang sama dapat dipahami secara berbeda oleh orang yang berbeda.
8. Menyadari adanya beberapa permasalahan dalam penganggaran tersebut, dan saya kira contoh di atas hanyalah tiga di antara berbagai permasalahan yang mungkin ada, maka saya menyambut baik prakarsa untuk mengadakan kegiatan evaluasi ini. Kegiatan evaluasi pada hari ini, saya percaya, adalah salah satu bentuk monitoring dan evaluasi, setidaknya monitoring dan evaluasi menurut pendapat para pelaku yang mengelola program/kegiatan. Memang akan ada resiko *bias* dalam hal ini, namun di sisi lain saya juga percaya, bahwa monitoring dan evaluasi yang baik tidak dapat mengabaikan pendapat dan masukan dari para pelaksana program dan kegiatan.
9. Oleh karena itu, dengan mengucapkan Bismillah saya membuka acara ini dan selamat melaksanakan evaluasi penganggaran kementerian/lembaga 2009/2010, semoga Tuhan Yang maha Esa memberkati kita semua. Terima kasih

Wassalamualaikum wr. Wb.

Dirjen Anggaran
21 Desember 2009

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap implementasi sistem penganggaran berbasis kinerja yang terdiri dari tiga pendekatan yaitu Unified Budget, PBB, dan MTEF di Depnakertrans?
2. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap implementasi penganggaran berbasis kinerja yang terdiri dari tiga pilar yaitu adanya indikator kinerja, evaluasi kinerja dan standar biaya di Depnakertrans ?
3. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai adanya anggapan bahwa antara prioritas yang ditetapkan dalam Renstra dan RKP dan belanja Negara terdapat inkonsistensi?
4. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap forum trilateral meeting dikaitkan dengan konsistensi antara RKP dan RKAKL serta bagaimana implementasinya?
5. Bagaimana pendapat Bapak terhadap pandangan bahwa sebagai suatu pendekatan baru sistem dan implementasi anggaran berbasis kinerja dalam operasionalnya belum dilengkapi ketentuan hukum yang memadai?
6. Bagaimana pendapat Bapak terhadap anggapan bahwa pola pengalokasian anggaran oleh K/L kepada instansi dibawahnya belum menganut konsep *money follow function and function follow structure* ?
7. Bagaimana penilaian Bapak mengenai hubungan kelembagaan yang berlangsung selama ini, terkait dengan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab (DPR, Bappenas, Depkeu, K/L) dalam pengelolaan anggaran Negara ?
8. Apakah kunci sukses implemementasi anggaran berbasis kinerja dilihat dari aspek SDM, hubungan kelembagaan, peraturan perundangan-undangan?

Lampiran 8

PERBANDINGAN PAGU, GAJI POKOK, HONOR DAN PERJALANAN DINAS TA. 2007 s.d. 2009 DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

dalam juta Rp

NO.	UNIT ESELON I	2007				2008				2009			
		Total Pagu	Gaji Pokok	Honor-Honor	Perjalanan Dinas	Total Pagu	Gaji Pokok	Honor-Honor	Perjalanan Dinas	Total Pagu	Gaji Pokok	Honor-Honor	Perjalanan Dinas
1	Sekretariat Jenderal	407,240,662	31,727,933	21,599,307	59,244,686	238,821,628	30,355,068	15,876,255	45,558,719	347,278,285	26,014,333	18,073,035	61,583,528
2	Inspektorat Jenderal	41,192,256	4,597,125	161,424	25,563,807	33,301,980	5,463,250	1,174,993	18,704,232	37,454,272	6,789,602	911,568	23,343,315
3	Ditjen Binapenta	331,491,899	6,995,625	69,235,605	73,700,893	314,407,486	7,501,456	79,132,870	69,844,115	481,770,232	7,667,372	150,837,662	88,429,211
4	Ditjen PHI dan Jamsos	95,272,837	4,228,665	22,323,044	34,924,322	99,280,000	4,475,939	15,067,463	38,607,742	85,233,290	5,194,802	13,181,778	32,108,936
5	Ditjen P4T	625,214,445	12,555,388	13,417,401	78,633,038	591,634,759	13,298,940	10,441,065	56,648,695	696,697,464	13,408,882	12,912,433	78,404,791
6	Ditjen P2MKT	58,357,300	11,358,140	39,689,289	83,519,707	580,199,006	12,092,451	30,351,598	43,458,983	535,938,184	13,754,417	27,984,941	58,668,789
7	Ditjen PPK	88,771,822	4,413,240	11,948,282	26,669,402	142,092,101	5,295,888	14,134,270	52,147,683	91,900,908	5,370,051	9,059,156	39,465,989
8	Balitfo	54,470,306	7,042,981	6,186,325	19,626,968	50,665,703	7,997,297	4,431,877	14,803,832	36,927,119	8,274,865	2,542,860	8,310,963
9	Ditjen Binalattas	642,350,654	30,978,698	99,210,682	96,696,307	592,996,684	37,791,436	78,488,699	73,991,097	639,297,372	39,493,549	92,800,268	93,226,229
	JUMLAH PAGU	2,344,362,181	113,897,795	283,771,359	498,579,130	2,643,399,347	124,271,725	249,099,090	413,765,098	2,952,497,126	125,967,873	328,303,701	483,541,751

Prosentase terhadap total pagu 4.86% 12.10% 21.27% 4.70% 9.42% 15.65% 4.27% 11.12% 16.38%